

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH ACEH)

Susi Susanti*¹, Heru Fahlevi*²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
Email: susi04081992@gmail.com¹, hfhahlevi@gmail.com²

ABSTRACT

The purpose of this study was to test the influence of local revenue (PAD), general allocation fund (DAU), sharing-revenue fund (DBH), and degree of decentralization against capital expenditure in regencies / cities in Aceh region. The population in this study were all local governments in Aceh Region during 2011-2014. In Aceh, there are 23 districts / cities which consists of 18 counties and 5 cities. The method used in this research is census. The data used is secondary data obtained Budget Realization Report of the Provincial Finance Department. The analysis used is multiple linear regression analysis. The results showed that, together local revenue, general allocation fund (DAU), and sharing-revenue fund (DBH) against capital expenditure in regencies / cities in Aceh region. Local revenue positive effect on capital expenditure in regencies / cities in Aceh Region. The general allocation fund has no effect on capital expenditure in regencies / cities in Aceh Region. Revenue-sharing is no effect on capital expenditure in regencies / cities in Aceh Region.

Keywords: *capital expenditure, fund local own revenue (PAD), general allocation fund (DAU), sharing-revenue fund (DBH)*

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah (Siswanto, 2008). Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Abdurrahman, 1987). Tim Peneliti dari *Public Expenditure Analysis Or Capacity Strengthening Program (PECAPP)* yang tercatat sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, dengan catatan sebesar Rp 5,4 triliun belanja modal dinyatakan sudah dibelanjakan oleh pemerintahan Aceh. Seluruh pembangunan jalan atau jembatan memiliki porsi yang lebih besar dari belanja infrastruktur Aceh sebelumnya yang tercatat sebesar 44%. Namun daftar Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Bina Marga (DBM) tahun 2012 memperlihatkan bahwa belanja infrastruktur tercatat sebesar Rp 1,5 Triliun atau tercatat sebesar Rp 682

milliar dimanfaatkan untuk belanja pembangunan jalan dan jembatan namun, belanja untuk infrastruktur perdesaan berkisar sekitar 14% atau tercatat sebesar Rp 211 miliar. Sedangkan besarnya belanja infrastruktur di Aceh juga belum tersalurkan secara menyeluruh. Dibagian Wilayah pantai barat dan bagian wilayah tengah Provinsi Aceh mempunyai fasilitas sarana infrastruktur masih sangat minim. Secara umum tercatat sebesar 39% bahwa jalan di seluruh kabupaten dalam Provinsi Aceh dinyatakan dalam kondisi rusak. Pada tahun 2011 tercatat lebih dari 90% jalan di dua kabupaten yaitu Nagan Raya dan Aceh Jaya dinyatakan rusak. Bahkan, di Kabupaten Gayo Lues juga terhitung lebih dari 50% jalan tersebut masih digolongkan dalam kondisi rusak. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur untuk pemerintah Aceh. Selain itu, Pengalokasian anggaran yang berasal dari dana otonomi khusus dinyatakan belum akurat untuk kebutuhan serta kondisi di lapangan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu

mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik (Aprizay, *et al.*, 2014).

Darise (2008:141) mengemukakan bahwa belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk biaya pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian serta pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang memiliki nilai manfaatnya melebihi batas 12 (dua belas) bulan digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah pusat dan daerah menjelaskan bahwa PAD adalah sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah untuk dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramanda, 2010).

UU No. 33 tahun 2004 Pasal 35 yang menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatakan bahwa hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk rangka pelaksanaan desentralisasi juga bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Darise, 2009).

DBH (Dana Bagi Hasil) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah (Listiorini, 2012). Menurut Nordiawan (2006) DBH merupakan pajak dan sumber daya alam pajak sendiri terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan (PPh), maka baik dari WP orang pribadi dalam negeri ataupun dari PPh 21.

kaitan antara PAD dengan belanja modal merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD berasal dari iuran langsung atas masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dengan cara memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik untuk masyarakat melalui anggaran belanja modal, oleh karena itu masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang berikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana atau prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur sarana atau prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian adanya hubungan PAD antara belanja modal. Akan tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan di atas rata-rata diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Kaitan antara DAU dengan Belanja Modal merupakan Sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana atau prasarana untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahwa yang membedakan PAD dengan DAU adalah PAD berasal dari uang yang diperoleh daerah itu sendiri, sedangkan DAU berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Darise (2009), menjelaskan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Permasalahan dana alokasi umum timbul ketika daerah meminta dana alokasi umum sesuai kebutuhannya.

Kaitan antara DBH dengan belanja modal yaitu dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah melihat angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004/ PP Nomor 55 Tahun 2005) angka persentase yang dimaksud adalah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sumber dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.

2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Belanja Daerah

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- a. Belanja Langsung langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- b. Belanja belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung melalui pelaksanaan program atau kegiatan, antara lain belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2.1.2 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/06/2007, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran digunakan pada rangka untuk memperoleh dan menambah aset tetap atau aset lainnya dalam memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi pengeluaran untuk biaya yang melebihi batas waktu kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Halim dan Kusufi (2012:107) mengklasifikasikan belanja modal sebagai berikut: Belanja Tanah, Belanja modal peralatan atau mesin, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Bangunan atau Gedung, Belanja Modal Fisik lainnya merupakan biaya/pengeluaran yang difungsikan sebagai pengadaan.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Halim (2007:96) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 6 pendapatan asli daerah berasal dari: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan dari dinas dan pendapatan yang sah.

2.1.3.1 Pajak Daerah

Prakosa (2003:2) Menjelaskan lebih lanjut bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa mengharapkan imbalan langsung yang seimbang, namun dapat dipaksakan terhadap undang-undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya. Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009, dijelaskan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuana, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi daerah ialah pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang telah disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah, Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk, Retribusi dikenakan sanksi untuk siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah memiliki tiga komponen yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum tergolong sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha tergolong sebagai retribusi jasa usaha, dan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu tergolong sebagai retribusi perizinan tertentu.

2.1.4 Dana Alokasi Umum

DAU (Dana Alokasi Umum) adalah jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun Tujuan dari transfer adalah sebagai penutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan kemampuan fiskal antara daerah untuk daerah sehingga dana alokasi umum setiap daerahnya tidak pernah sama besarnya (Munir, 2003). Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan dana alokasi umum merupakan dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.5 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu (a). dana bagi hasil pajak, (b). dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). DBH yang berasal dari sumber daya alam yaitu: 1). kehutanan; 2). pertambangan umum; 3). perikanan; 4). pertambangan minyak bumi; 5). pertambangan gas bumi; 6). Pertambangan minyak bumi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap Belanja Modal antara lain:

- a. Darwanto dan Yustikasari (2007) “pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal”. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Secara parsial, PAD berpengaruh positif dan DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
- b. Pelealu (2013) “pengaruh dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah terhadap belanja modal”. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel DAK, PAD Berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
- c. Miharbi (2013) “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal”. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK Berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
- d. Arbie Gugus Wandira (2013) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. Hasilnya menunjukkan bahwa Variabel PAD

tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dalam meningkatkan pembangunan. Keuangan pemerintah daerah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Mamuka dan Inggriani, 2014). Jaya dan Dwirandra (2014) menyebutkan PAD yang tinggi akan digunakan oleh pemda untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan belanja modal.

2.3.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Dana alokasi umum dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya.

2.3.3 Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH (DBH Pajak atau DBH SDA) manakah yg memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian antara lain sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama

berpengaruh terhadap Belanja pada Modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh;

H₂: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh.

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh;

H₄: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh.

3. Metode Penelitian

Desain atau rancangan suatu penelitian terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu desain penelitian yang menyangkut serangkaian pilihan pengambilan keputusan rasional sebagaimana diuraikan oleh Sekaran (2006: 152) dijelaskan bahwa desain penelitian yang terdiri dari serangkaian tujuan penelitian, jenis atau isu-isu yang mengenai tujuan studi, konteks studi, penelitian tingkat investigasi, tingkat intervensi penelitian terhadap studi, horizon waktu, unit analisis.

3.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti baik terbatas maupun tidak terbatas. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di wilayah Aceh dari 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota yang akan diamati selama 4 tahun dari tahun 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan merupakan sensus. Sensus merupakan keseluruhan elemen pada populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu kabupaten/kota di wilayah aceh pada tahun 2011-2014 dan memiliki laporan APBD yang lengkap dalam kurun waktu penelitian selama periode 2011-2014.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh periode 2011-2014. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada (Sekaran, 2006:77). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumen yang dipublikasikan). Beberapa sumber dari data sekunder diperoleh dari publikasi pemerintah, dokumen LRA yang diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh, LRA dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website, undang-undang/qanun, informasi dan data penelitian dari PECAPP (*Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program*), laporan resmi/penelitian ilmiah, studi kasus dan dokumen perpustakaan.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006:115). Penelitian ini melibatkan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.3.1 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel devenden atau variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian utama bagi peneliti (Sekaran, 2006:116). Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu belanja modal.

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel indevenden yang mempengaruhi variabel terikat antara positif atau negatif. Variabel Bebas yang mempengaruhi variabel terikat (Sugiyono 2005:34). Dalam penelitian ini variabel indevenden yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil.

3.5 Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Data yang di analisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen LRA yang diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh, LRA dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui *website*, undang-undang/qanun, laporan resmi/penelitian ilmiah, studi kasus dan dokumen perpustakaan. Dari laporan tersebut diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran belanja modal, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah tahun 2011-2014.

3.5.1 Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Pengolahan data menggunakan program *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

3.5.1 Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan pengukuran variabel dengan menggunakan model dalam penelitian ini yaitu variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk melakukan pengujian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (X₁), dana alokasi umum (X₂), dan dana bagi hasil (X₃) terhadap belanja modal (Y₁) dalam penelitian ini melakukan dengan cara regresi linier.

3.5.1.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi merupakan hubungan antara nol dan satu. Nilai *adjusted R²* kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas atau minim.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji variabel independen dan dependen, pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara individual dan parsial terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh. Untuk melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dan pengujian hipotesis yang telah dibuat, data diolah dengan menggunakan program SPSS 21 *for Windows Evolution Version*.

4.1.1 Statistik Deskripsi Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang telah diamati. Karakteristik tersebut terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (*standard deviation*).

4.1.2 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Pengujian PAD, DAU, dan DBH untuk melihat pengaruhnya terhadap Belanja Modal baik secara simultan maupun parsial digunakan analisis regresi linear berganda.

$$Y = 113917196034 + 0,497X_1 + 0,117X_2 + 0,118X_3 +$$

Persamaan di atas menunjukkan nilai koefisien PAD, DAU, dan DBH yang positif, menandakan adanya hubungan positif antara PAD, DAU, DBH terhadap belanja modal, baik secara simultan maupun parsial. Dengan demikian, baik hipotesis pertama (H_1), kedua (H_2), ketiga (H_3) maupun ketiga (H_4) diterima.

4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk melihat apakah menerima atau menolak hipotesis yang dilakukan pengujian secara statistik. Maka dari itu analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan tujuan untuk melihat apakah pendapatan asli daerah, dana

alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal, dengan menggunakan program software (SPSS).

4.1.3.1 Pengujian Secara Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. H_{01} ditolak jika semua $\beta_i = 0; (i=1,2,3)$. Variabel independen (PAD, DAU, dan DBH) sama dengan nol. H_{01} diterima apabila paling sedikit ada satu semua $\beta_i = 0; (i=1,2,3)$. Variabel independen (PAD, DAU, dan DBH) tidak sama dengan nol.

4.1.3.2 Pengujian Secara Parsial

Pengujian secara parsial bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen (PAD, DAU, dan DBH) terhadap variabel dependen.

4.1.3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, maka hubungan PAD dengan Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

$H_{02}: \beta_1 = 0$; maka pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh.

$H_{a2}: \beta_1 \neq 0$; maka pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh.

4.1.3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, maka hubungan dana alokasi umum dengan belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

$H_{03}: \beta_2 = 0$; bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh.

$H_{a3}: \beta_2 \neq 0$; bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh.

4.1.3.2.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, maka hubungan dana bagi hasil dengan belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- $H_{04}: \beta_3 = 0$; Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh.
- $H_{04}: \beta_3 \neq 0$; Dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh.

4.1.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada umumnya yaitu untuk mengukur besar persentase variasi variabel devenden yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel indeviden.

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD, DAU, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh. penelitian ini dimana PAD, DAU, DBH secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan secara parsial hasilnya berpengaruh positif maka penelitian ini sangat konsisten dengan penelitian sebelumnya. Pengaruh PAD, DAU, dan DBH secara bersama-sama terhadap Belanja Modal adalah sebesar 80% berarti sisanya sebesar 20% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD di peroleh dari iuran masyarakat seperti pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin memungkinkan daerah tersebut bisaterpenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus berharap kepada pemerintah pusat, yang berarti pemerintah daerah mampu untuk mandiri terhadap manajemen keuangan transparansi dan akuntabel.

4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh. Pemerintahan daerah otonomi memiliki kewewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan adanya aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004. Hal ini sebabkan karena dana alokasi umum salah satunya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk kesamaan dalam kemampuan keuangan daerah dan dana tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi.

4.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan alokasi anggaran belanja modal. Tujuan utama dari dana bagi hasil yaitu untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeridan PPh pasal 21.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda, maka hasil di peroleh antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti selama empat tahun yaitu 2011, 2012, 2013, dan 2014.
2. Pemilihan variabel bebas pada penelitian ini hanya sebatas variabel PAD, DAU, dan DBH untuk menjelaskan variabel Belanja Modal, sedangkan sebenarnya banyak variabel lain yang dapat mengukur belanja modal yang tidak termasuk pada penelitian ini.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal.
2. Berhubung penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten/kota yang ada di Wilayah Aceh, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian, tidak hanya pada tingkat provinsi, namun tingkat se-indonesia.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan rentang waktu pengamatan lebih dari empat tahun minimal pengamatan selama 6 tahun sehingga lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta dapat memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif.
4. Pemda sebaiknya mengoptimalkan potensi penerimaan daerah terutama dalam bentuk PAD sehingga tidak terlalu bergantung kepada penerimaan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprizay, Yudi Satrya, Darwanis & Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Syiah Kuala. Vol: 3 No. 1 Februari 2014 pp.140-149.

- Abdulrahman, 1987. *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Indonesia*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Ardhani, Pungky. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Journal*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Darwanto & Yulia Yustika Sari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Untuk Eksekutif dan legislatif Rangkuman 7 Undang-undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri*. Jakarta Barat: Indeks.
- Dwi, Siswanto Adrianus. 2008. Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Derajat Otonomi Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol.12 No. 1.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika & A.A.N.B Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*: 7 (21): 79-92.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Listiorini. 2012. Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol.4 No. 2, Juli: 111-126.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. 2001. *Non-linier And Asymetric Adjustment The Local Revenue-expenditure Models: Some Evidence From Theitalian Municipalities*. University Of Milan, Working Paper.
- Miharbi, Liyoni Arista. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana

- Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal*. Gorontalo
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. 2014. Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*. Vol 2. No.1: 646-655.
- Mayeztika. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nyoman, Sugawa Korry. 2005. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. <http://www.Balipost.co.id>. Diakses 19 september 2005.
- Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP). 2013. *Analisa Belanja Publik Aceh 2012*. Melalui <http://analisadaily.com/news/2013/27241/sdm-penyebab-penyimpangan-anggaran-aceh> diakses [02/02/13].
- Prakosa, Kasit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pelealu, Andreas Marzel. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kota Manado tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No. 4: 1189-1197.
- Ramanda, Riska. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli terhadap Belanja Daerah di Provinsi Riau*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/06/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar (BAS)*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis (Terjemahan Kawan Menyon)* Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta
- Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. 2008. *Grand Design*. Jakarta:
- Desentralisasi Fiskal Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. S